

RADIKALISME DI JANTUNG PENDIDIKAN ISLAM

Khamami Zada

Abstract

This paper is a critical reflection on radicalism phenomenon which emerges at the heart of Islamic education, especially at Madrasah and Islamic boarding school, which is enhanced more by its development at schools and campus. This educational institution is chosen since it is at this place the character development is begun as a cadre forming facility. The aspiration of radical Islamic group is to change a state, replace its basis as well as its law. The emerge of this radicalism has shifted Islam in Indonesia, i.e. from the one dominated by moderate-ism to radicalism. Islamic education as a people liberation facility is faced against a challenge on how to develop a moderate religious consciousness so in turn among the people will grow an inclusive understanding.

Keywords: radicalism, character development, moderate religious

I. Pendahuluan

Sejak dulu, Islam di Indonesia sangat kaya dengan polarisasi. Di zaman prakemerdekaan saja, Islam sudah menunjukkan wajahnya yang beraneka ragam, yang direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam. Ketika itu, sudah berdiri Jami'atul Khair, Hayatul Qulub, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Washliyah, Nahdlatul Wathan, dll. Semuanya itu merupakan bagian dari pembacaan para pelaku sejarah terhadap problem sosial, ekonomi, politik

Khamami Zada, MA adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Koordinator Program Kajian Agama dan Kebudayaan PP Lakpesdam NU

dan agama yang mereka hadapi di zaman penjajahan Belanda.¹

Lahirnya ormas-ormas Islam ketika itu sesungguhnya bukan sekadar organisasi kumpul-kumpul, melainkan sudah menjadi gerakan (*movement*) yang didasarkan pada ideologi yang dibangun para pendirinya. Ada ideologi puritanisme, tradisionalisme, revivalisme, dan yang lainnya. Karena sifatnya sebagai gerakan, maka tak bisa dipungkiri berdirinya ormas-ormas Islam sesungguhnya menampilkan aroma kontestasi (persaingan) untuk memperebutkan klaim kebenaran (*truth claim*) teologis-fiqh dan pengikut (*jama'ah*). Yang paling kentara dari tesis ini adalah berdirinya NU tahun 1926 yang sering dianalisis oleh banyak pihak sebagai reaksi terhadap Muhammadiyah yang beraliran Wahabi, puritan, dan modernis. Para ulama resah terhadap pembaharuan Muhammadiyah yang menggunakan paham Wahabi yang sangat keras penolakannya terhadap tradisi, di tambah lagi dengan modernisasi pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah yang bisa berimplikasi negatif terhadap otoritas ulama.² Tak heran jika sampai sekarang ini, jika ditarik secara genealogis, ormas-ormas Islam mengalami kontestasi, gesekan, dan konflik yang menjadi sejarah panjang.

Tanpa disadari, sekarang ini kontestasi yang sudah terbaca dari setiap sejarah pendirian ormas-ormas Islam di zaman kolonialisme berujung pada kontestasi baru yang begitu beragam dengan orientasi dan ideologi baru. Sejak 1998 (pasca lengsernya rezim Soeharto), gerakan Islam di Indonesia telah menunjukkan keragaman yang luar biasa (dari sayap radikal hingga sayap liberal) yang memiliki *concern* garapan yang berbeda-beda. Munculnya banyak organisasi Islam sejak bergulirnya reformasi memberikan warna lain dari gerakan Islam Indonesia

¹ Lihat Khamami Zada. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: Teraju ; Berdirinya Hayatul Qulub diprakasai oleh Haji Abdul Halim di Majalengka Jawa Barat yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Lihat Warkum Sumitro. 2005. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia, h. 67

² NU berdiri di Surabaya tahun 1926 sebagai reaksi terhadap gerakan Islam, terutama di kalangan Muhammadiyah dan Persis. Organisasi NU merupakan perluasan dari Komite Hijaz yang dibentuk dengan dua maksud, yaitu untuk mengimbangi Komite Khilafah yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan kelompok modernis dan untuk berseru kepada Ibnu Sa'ud, penguasa baru di Arab Saudi agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan. Lihat Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam...*, h. 72. Untuk lebih jelasnya dapat dilacak Deliar Noer. 1994. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, h. 241-243.

yang cenderung didominasi oleh kelompok Islam moderat, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Karena itulah, jika diamati secara generik, ada label yang dimunculkan oleh kelompoknya itu sendiri atau dilabeli oleh para peneliti dan cendekiawan; Islam puritan, Islam skripturalis, Islam substantif, Islam literal, Islam ekstrem, Islam militan, Islam garis keras, Islam progresif, Islam liberal, Post-Tradisionalisme Islam, dll.³

Jika dulu, kontestasinya lebih banyak pada persoalan fihiyyah (qunut, shalat tarawih 8 atau 20 rakaat) dan teologi (sinkretisme: ziarah kubur, tradisi 7 bulan, tahlil kematian 7 hari, 40 hari, dan 1000 hari), maka sekarang ini kontestasinya dibungkus dengan ideologi politik; negara Islam dan khilafah Islamiyah. Para pemainnya pun sudah mulai banyak dengan munculnya kelompok Islam radikal.

Berkembangnya kelompok-kelompok Islam radikal telah memberi warna keislaman di Indoensia. Alih-alih dengan maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia sejak bom Bali 2002 hingga tertangkapnya jaringan teroris Noordin M. Top. Dalam konteks yang lebih diskursif, mereka merespon isu-isu penting yang terkait dengan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Yaitu, negara Islam, syariat Islam, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mereka juga melihat; apakah sistem kenegaraan Indonesia sudah sesuai dengan Islam atautkah tidak. Itu sebabnya, mereka selalu memperjuangkan berdirinya negara Islam. Meskipun sedikit bervariasi model negara Islam yang dicita-citakan, tetapi pada dasarnya mereka meyakini bahwa negara Islam adalah yang terbaik; yakni ide kedaulatan Tuhan dengan berlakunya syariat Islam. Dengan demikian, demokrasi sebagai sistem politik mereka tolak karena demokrasi dipandang sebagai sistem sekuler yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu pula dengan jabatan presiden tidak boleh diserahkan kepada wanita, karena hak kepemimpinan dalam Islam dipegang laki-laki.⁴

³ Lihat Clifford Geertz. 1960. *The Religion of Java*. Glencoe: Free Press; R. William Liddle, "Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward (ed). 1999. *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, h. 304; M. Syafi'i Anwar. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina ; Bahtiar Effendy. 1999. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

⁴Lihat Khamami Zada. *Op. Cit.*

Sesungguhnya ada beberapa faktor yang menyebabkan proses radikalisasi di kalangan umat Islam di Indonesia. *Pertama*, doktrin agama yang sangat kaku yang diajarkan di pesantren modern, terutama dengan seruan kembali ke masa klasik Islam secara *kaffah*. Pandangan ini menunjukkan sikap literal mereka dalam memahamai teks-teks agama yang harus sesuai atau sama dengan perilaku Nabi Saw. Pada gilirannya, mereka frustrasi terhadap perubahan dunia yang begitu cepat, sementara respons Islam sangat terlambat dan ketinggalan dibandingkan dengan masyarakat Barat-sekuler. Tak heran, jika konsep-konsep modern, seperti demokrasi, dan HAM sebagai produk Barat, mereka tolak secara radikal. Proses radikalisasi ini disebabkan oleh doktrin agama yang dipahami secara literal dan kaku, sehingga sulit menemukan relasinya dengan dunia modern.

Pandangan holistik mereka terhadap Islam berimplikasi, terutama lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertiannya yang literal, yang hanya menekankan dimensi “luar” (exterior)-nya. Dan kecenderungan seperti ini telah dikembangkan sedemikian jauh sehingga menyebabkan terabaikannya dimensi “kontekstual” dan “dalam” (*interior*) dari prinsip-prinsip Islam. Karena itu, apa yang mungkin tersirat di balik “penampilan-penampilan tekstualnya”-nya hampir-hampir terabaikan, jika bukan terlupakan maknanya. Dalam contohnya yang ekstrem, kecenderungan seperti ini telah menghalangi kaum Muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan al-Qur’an sebagai instrumen ilahiah yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia.⁵

Pengajaran agama yang eksklusif dan dogmatik telah melahirkan sikap permusuhan dengan kelompok di luarnya. Istilah Zionis-kafir seakan menjelma menjadi kesadaran keagamaan untuk melawannya dalam bentuk apa pun. Ditambah lagi dengan ideologi jihad yang dipahami sebagai perang melawan kaum Zionis-kafir, telah menambah deretan sikap radikal. Sehingga aksi kekerasan apapun yang dilakukan umat untuk menghancurkan Zionis-kafir, yang mereka sebut sebagai musuh-musuh Islam, adalah perjuangan agama yang paling luhur (*syahid*).

⁵Bahtiar Effendy, “Agama dan Politik: Mencari Keterkaitan yang Memungkinkan antara Doktrin dan Kenyataan Empirik”, dalam M. Din Syamsuddin. 2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, h. xvii.

Kedua, jaringan intelektual yang dilakukan pesantren modern berasal dari kawasan Timur Tengah yang berwatak keras, militan dan radikal, terutama ajaran Wahabisme yang dibawa secara literal ke wilayah Nusantara. Purifikasi adalah produk nyata dari jaringan intelektual Wahabisme dalam bentuk pemberantasan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dalam proses selanjutnya, jaringan intelektual ini meluas, tidak saja berpatokan pada mazhab Wahabisme, tetapi juga mengambil ideologi radikal sejumlah intelektual; seperti Hasan al-Bana, Al-Maududi, Sayyid Qutb, Hasan Turabi, dll. Itu sebabnya, psikologi radikalisme yang bergolak di Timur Tengah benar-benar dipraktikkan di tanah air sebagai perjuangan luhur agama.

Pemikiran dan gerakan Islam di Timur Tengah memang mempunyai pengaruh luas terhadap pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia,⁶ meskipun ada juga beberapa perbedaan penting, baik dalam substansi maupun bentuknya.⁷ Kendati demikian, gerakan Islam radikal di Indonesia tidak seperti yang terjadi di Timur Tengah yang sangat menekankan agenda-agenda politik; seperti menumbangkan rezim-rezim sekuler yang menerapkan ideologi-ideologi yang bukan hanya tidak *compatible*, bahkan *hostile* bermusuhan terhadap Islam. Gerakan radikal Islam baru sebatas pada tuntutan dipenuhinya aspirasi Islam, seperti pemberlakuan syariat Islam atau Piagam Jakarta, dan belum sampai pada usaha menumbangkan rezim berkuasa.

Ketiga, kebijakan politik luar negeri Barat yang tidak adil terhadap Islam. Perlawanan terhadap Barat yang dilakukan gerakan Islam adalah untuk memprotes intervensi Barat terhadap negara-negara Islam, seperti yang terjadi di Irak, Libya, Bosnia,⁸ dan Palestina. Umat Islam sudah

⁶Munculnya revivalisme Islam di Indonesia memberikan kepada pemerintah apa yang mereka anggap sebagai ancaman, baik bagi negara maupun bagi kekuasaan politik mereka sendiri. Pada tingkat pertama, mereka takut bahwa gerakan itu akan memperburuk ketegangan-ketegangan komunal dalam masyarakat majemuk, dan pemerintah memberikan reaksi tegas terhadap persekongkolan-persekongkolan yang diduga aktual untuk menumbangkan negara atas nama Islam. Lihat Fred Robert von der Nehden, "Islam dan Negara di Indonesia dan Malaysia", dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (ed.). 1985. *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 135

⁷Masykuri Abdillah. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, h. 11.

⁸Konflik di Bosnia, Palestina, dan Afghanistan telah mempertajam polarisasi dan radikalisasi masyarakat Muslim dunia. Lihat Akbar S. Ahmed dan Hastings Donnan

lama diperlakukan tidak adil oleh Barat secara politik, ekonomi dan budaya, sehingga mereka harus mendeklarasikan perlawanannya terhadap Barat. Dominasi Barat terhadap negara-negara Islam tidak dalam kapasitasnya yang saling bekerjasama, tetapi malah memojokkan dan memusuhi. Pada gilirannya, ketidakadilan Barat dilawan dengan aksi-aksi kekerasan, seperti yang terjadi di Palestina dan Libya. Sedang di Indonesia, perlawanannya diperlihatkan dengan gerakan protes terhadap ketidakadilan Barat terhadap dunia Islam, dan juga aksi terorisme terhadap simbol-simbol Barat, seperti pengeboman di Bali, Kedutaan Besar Australia, Hotel J.W. Marriot dan Ritz Charlton.

B. Merebut Kampus dan Masjid

Usaha mengubah mindset Islam Indonesia yang berkarakter moderat dimulai dari kampus, terutama kampus-kampus umum, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga. Pada awal 1980-an, gerakan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena memang sikap penguasa Orde Baru yang otoriter dan anti Islam. Tak heran dengan gerakan bawah telah berhasil menghimpun kader-kader muda militan, yang pada gilirannya akan melahirkan partai politik.

Basis yang digunakan dalam menyebarkan gagasan adalah masjid dan lembaga dakwah. Karena di sinilah pusat kegiatan dakwah Islam yang sangat strategis dalam mempengaruhi dan menjangkau massa Islam. Gerakan merebut masjid kampus dan lembaga dakwah dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) mempraktekkan amaliah ibadah, seperti layaknya santri pesantren (tertib shalat lima waktu, memperbanyak shalat sunnah, dan baca Al-Qur'an), dan (2) memperkenalkan simbol-simbol Islam dengan kebanggaan, seperti memelihara jenggot, menggunakan jilbab besar, dan mengganti bahasa keseharian dengan bahasa Arab (ikhwan, akhawat, Islam syumul dan kaffah). Dengan kepedulian yang tinggi terhadap Islam hingga dalam praktiknya yang ritual dan simbolik membuat daya tarik mahasiswa dan dosen begitu besar terhadap mereka. Karena gerakan seperti ini pada awalnya dipandang gerakan orang-orang shalih.

Dalam perkembangan terkini, gerakan mereka di kampus sudah menjadi kekuatan dominan yang sulit dipatahkan, karena jabatan-

(eds). 1994. *Islam, Globalization and Postmodernity*. London: Routledge, h. 8.

jabatan struktural di dekan dan mahasiswa dikuasai, sehingga kelompok lain sulit masuk dan melakukan perubahan. Ketika menjadi kekuatan kecil, mereka menggunakan demokrasi sebagai alat untuk melakukan perubahan kekuasaan, tapi setelah menjadi kekuatan dominan, demokrasi tidak lagi banyak dipakai untuk melakukan perubahan kekuasaan atau paling tidak sudah disiapkan perangkat untuk memenangkan kelompok mereka.

Inilah kekuatan mereka yang secara aktif melakukan gerakan agama dibanding dengan ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang cenderung pasif dalam merekrut kader baru. NU dan Muhammadiyah dengan kebesaran yang dimilikinya melupakan proses kaderisasi dan mempengaruhi kehidupan sosial-politik dan agama di kampus.

Jika pada periode 1980-an hingga 1990-an, kelompok Islam radikal hanya menjaring pengikut dari basis kampus dan kaum urban kota, maka sekarang ini pergerakan kelompok Islam radikal sudah merambah ke kampung-kampung dan kantong-kantong yang selama ini dikuasai NU dan Muhammadiyah. Masjid yang biasanya diurus oleh pengurus ta'mir dari warga NU dan Muhammadiyah mulai diambil alih oleh kelompok Islam radikal. Tak heran jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah mulai resah karena masjid yang selama ini diklaim menjadi basis sosial-keagamaan NU dan Muhammadiyah sudah banyak yang beralih ke kelompok Islam, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Partai Keadilan sejahtera (PKS).

Jika dulu mereka hanya menguasai masjid-masjid kampus melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK), terutama kampus-kampus umum, seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), sekarang ini masjid-masjid di perkotaan sudah mulai dimasuki oleh Islam radikal dengan membawa suasana keagamaan yang lebih taat dan mengandalkan kecanggihan manajemen. Titik lemah dari organisasi NU dan Muhammadiyah karena banyaknya jama'ah dan besarnya organisasi biasanya tidak serius memperhatikan warganya sehingga mereka banyak yang lari ke organisasi Islam radikal. Sebaliknya kelompok-kelompok Islam radikal justru sangat perhatian terhadap warganya, sehingga militansinya begitu kuat dan tidak mudah terpengaruh terhadap daya tarik di luarnya.

Melihat meluasnya pandangan keagamaan konservatif-radikal di lingkungan umat Islam, baik di tingkat *grass root* (akar rumput) maupun di tingkat elite pimpinan organisasi Islam moderat, seperti NU dan Muhammadiyah, maka tampak sekali bahwa kecenderungan umat Islam sekarang ini adalah kembali ke pemahaman keagamaan konservatif-radikal. Inilah yang kemudian dapat kita lihat bahwa telah terjadi pergeseran orientasi umat Islam Indonesia, dari yang berwarna moderat ke radikal.

C. Membangun Kader di Sekolah dan Pesantren

Kecenderungan radikalisme Islam di Indonesia terus merambah ke jantungnya pendidikan Islam. Setelah kampus dan masjid mulai diambil alih secara sistematis, maka sasaran lainnya adalah sekolah dan pesantren. Dua lembaga pendidikan inilah yang menjadi warna baru dari berkembangnya radikalisme Islam di Indonesia. Di sinilah disemai kader-kader baru yang militant yang dapat menjadi generasi handal dalam melakukan proses mempengaruhi kehidupan social masyarakat dan kenegaraan.

Sejatinya sudah sejak lama, pendidikan dasar menjadi sasaran kaderisasi kelompok radikal. Hal ini terlihat sejak dikuasainya Rokhis (rokhianiawan islam) yang ada di sekolah-sekolah negeri. Dengan mereka menguasai Rokhis, maka sesungguhnya mereka mengontrol pemahaman keagamaan siswa. Tak heran jika kita perhatikan bahwa para pengurus Rokhis memiliki pemahaman keagamaan yang tidak moderat; mulai ada yang mempertanyakan ideologi Pancasila, demokrasi, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Mereka banyak yang menginginkan berdirinya Negara Islam, bahkan, ada yang mengusulkan berdirinya Khilafah Islamiyah.

Jika para siswa sudah mulai mempertanyakan ideologi Pancasila, maka sesungguhnya para guru di sekolah mengalami kegagalan dalam mengajarkan mata pelajaran PPKN, yang berisi tentang wawasan Pancasila dan Negara Indonesia. Dalam hal ini, sesungguhnya sekolah-sekolah telah menanam bom waktu yang tak disadari oleh para guru. Hal demikian berlangsung cukup lama karena ideologi yang disebarkan di sekolah ini dibungkus dengan perilaku Islam yang santun, sehingga dipandang oleh guru justru membanggakan.

Berkembangnya Rokhis biasanya banyak dijumpai di sekolah negeri, yang menjadi pusat kader cerdas, yang akan menjadi penerus bangsa.

Maka tak bisa dibayangkan jika generasi cerdas yang lahir dari sekolah-sekolah negeri justru menentang ideologi bangsanya. Meskipun gerak radikalnya belum begitu nampak karena mereka memang dari aspek usia masih belia, sehingga belum mampu menggalang kekuatan massa untuk melakukan perubahan, tetapi potensi mereka sebagai bibit unggul tak bisa dibayangkan kelak dalam membangun bangsa.

Perkembangan terbaru yang juga harus dilihat adalah munculnya sekolah Islam terpadu, terutama untuk Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar Islam Terpadu. Meskipun tidak begitu nampak kecenderungan radikalnya, tetapi pendidikan di usia dini ini sangat potensial untuk menumbuhkembangkan pemahaman keagamaan radikal sejak usia dini. Apalagi kecenderungan masyarakat lebih menyukai sekolah Islam terpadu ketimbang madrasah atau pesantren. Bahkan, warna politiknya juga muncul dalam beberapa sekolah Islam terpadu. Kecenderungan mengarahkan siswa memilih partai tertentu sudah mulai muncul di banyak sekolah. Tak bisa dipungkiri bahwa para guru yang disebar oleh PKS di sejumlah sekolah, termasuk di sekolah Islam terpadu cukup besar.

Bahkan yang juga tak disadari oleh pemerintah, khususnya Departemen Agama dengan kurikulum fiqhnya yang masih mengakomodir materi “Khilafah Islamiyah”. Jika guru yang mengajar memiliki paham yang sama tentang “Khilafah Islamiyah” versi Hizbut Tahrir, maka akan berbahaya bagi NKRI sebagai bentuk Negara yang disepakati dalam Undang-undang Dasar 1945. Begitu pula kurikulum di madrasah memiliki potensi radikalnya, terutama dalam materi pelajaran tauhid (terutama terminologi kafir) dan fiqh (jihad dan khilafah Islamiyah). Jika ini terus dibiarkan tanpa adanya penafsiran yang moderat, maka pemahaman tentang jihad dan khilafah Islamiyah berpotensi pada radikalisme. Inilah yang memudahkan kelompok Islam radikal masuk ke dalam jantung pendidikan Islam secara gratis.

Di pihak lain, maraknya aksi terorisme yang melibatkan alumni pesantren sejatinya telah memperkuat asumsi bahwa ada beberapa pesantren yang memiliki doktrin keagamaan yang radikal. Meskipun asumsi ini masih harus diverifikasi lebih lanjut, karena aksi radikalisme tidak hanya disebabkan oleh pemahaman keagamaan. Namun demikian, kecenderungan ini membenarkan polarisasi yang pernah dibuat oleh Martin Van Bruinessen bahwa pesantren sebagai institusi keagamaan yang memiliki “*great tradition*” (tradisi agung) untuk mentransmisikan

Islam di Indonesia mengalami polarisasi ke dalam pola tradisional, modernis, reformis dan fundamentalis mengikuti aliran-aliran Islam yang berkembang.⁹ Karena itulah, pesantren sudah bukan lagi menjadi karakter khas kelompok tradisional yang selama ini memiliki jaringan pesantren terbesar di wilayah Nusantara. Kini, pesantren sudah dimiliki oleh setiap aliran keagamaan (Islam) di Indonesia, baik yang tradisional, modernis, dan bahkan yang berhaluan radikal.

Sejak terungkapnya para pelaku aksi pengeboman Bali yang melibatkan alumni santri Pondok Pesantren al-Islam, Lamongan dan ditangkapnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir¹⁰ sebagai pimpinan Pondok Pesantren al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, yang diduga ikut terlibat dalam beberapa aksi kekerasan di tanah air, pengaitan terorisme dengan pesantren terus berjalan hingga kini. Tampaknya, memang ada jaringan yang menghubungkan antara mereka dengan radikalisme secara diskursif dan praksis.

Fenomena radikalisme pesantren sesungguhnya sesuatu yang aneh, dan baru belakangan ini terjadi. Pesantren sebagai institusi keagamaan sebenarnya tidak didirikan untuk melahirkan radikalisme. Pesantren bertugas untuk mencetak kader-kader ulama yang berpengetahuan luas.¹¹ Karena itu, pesantren mengajarkan semua hal yang ada di dalam agama; dari tauhid, syariat, hingga akhlak. Kesemuanya ini bertujuan agar selepas dari pesantren kelak, para santri dapat melakukan dakwah agama ke tengah-tengah masyarakat secara mumpuni.

Bahkan, karakter otentik pesantren dari zaman awal berdirinya pesantren sesungguhnya menampilkan wajahnya yang toleran dan

⁹ Martin Van Bruinessen. 1995. *Kitab Kuning dan Tarekat*. Bandung: Mizan.

¹⁰ Abu Bakar Baasyir, Abdullah Sungkar, Abu Jibril singgah di Kuala Pilah. Daerah ini terletak sekitar 250 kilometer di sebelah tenggara Kuala Lumpur. Berdasarkan penelusuran Tempo, mereka pertama kali diterima Ustadz Hasyim Gani. Versi lain menyebut Abdul Wahid Kadungga, menantu Kahar Muzakar, bekas tokoh Darul Islam di Sulawesi Selatan, yang pertama kali menjemput mereka di Malaysia.

¹¹ Menurut konsep ini, hanya ulama lah yang mempunyai otoritas untuk menginterpretasi dua sumber pokok Islam. *Inheren* dalam pernyataan ini adalah pernyataan lain yang mengatakan bahwa hanya komunitas Muslim sajalah yang dibebani dengan tugas-tugas pokok untuk memimpin masyarakat umum (*the society at large*). Dengan kata lain pondok pesantren merupakan model utama bagi pencarian pengetahuan masyarakat Muslim. Lihat Abdurrahman Wahid, "Pondok Pesantren Masa Depan", dalam Marzuki Wahid, dkk (peny.). 1999. *Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah, h. 16.

damai. Di pelosok-pelosok pedesaan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, banyak ditemukan *performance* pesantren yang berhasil melakukan dialog dengan budaya masyarakat setempat. Pesantren-pesantren yang ada di Jawa, terutama yang bermazhab Syafi'i dan memiliki hubungan dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU) menampilkan sikap akomodasi yang seimbang dengan budaya setempat. Sehingga pesantren mengalami pembauran dengan masyarakat secara baik. Keberhasilan pesantren seperti ini kemudian menjadi model keberagamaan yang toleran di kalangan umat Islam pada umumnya. Tak heran, jika karakter Islam di Indonesia seringkali dipersepsikan sebagai Muslim yang ramah dan damai. Karena itu, hampir tidak pernah terjadi proses radikalisisasi di kalangan santri atas nama doktrin agama dalam bentuk aksi kekerasan.

Namun demikian, seiring dengan beragamnya corak pesantren di wilayah Nusantara; dari yang namanya pesantren salaf/tradisional; pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, khususnya Islam klasik, sampai kemudian dimarakkan dengan pesantren khalaf/modern, yang sudah mengajarkan mata pelajaran umum, wajah pesantren perlahan-lahan berubah. Pesantren tidak lagi menjadi agen perubahan sosial dengan kemampuannya beradaptasi dengan tradisi lokal, melainkan melakukan purifikasi yang luar biasa.

Di sinilah radikalisme pesantren harus dimaknai sebagai gugatan terhadap wajah pesantren pada umumnya yang telah mengajarkan agama tidak seperti yang diajarkan Rasulullah Saw di masa-masa awal Islam. Gugatan demi gugatan dilakukan dengan melakukan purifikasi ajaran dari praktek keagamaan yang dianggap sinkretik secara besar-besaran. Dalam hal ini, mereka menginginkan agar semua pesantren tidak begitu saja menyesuaikan dengan tradisi lokal yang berbau bid'ah. Pada tahap selanjutnya, terjadilah radikalisme dalam wilayah doktrinal dan praktek keagamaannya.

D. Moderatisme Pendidikan Islam

Dalam konteks inilah, pendidikan Islam (kampus, sekolah, madrasah dan pesantren) mesti melakukan introspeksi terhadap ajaran dasarnya agar tidak terlalu literal dan kaku dalam merespon perubahan zaman. Bukankah radikalisme di jantung pendidikan Islam justru menambah citra negatif masyarakat Muslim di tanah air? Dengan demikian, pendidikan Islam mesti dikembalikan ke dalam format awalnya sebagai pusat pendidikan agama yang mampu melakukan adaptasi dengan

kebudayaan masyarakat setempat secara baik, tanpa harus saling menafikan. Dalam konteks selanjutnya, pendidikan Islam diharapkan dapat mencetak kader-kader muda beragama yang tidak bersikap apatis terhadap zaman, melainkan memunculkan optimisme terhadap masa depan kehidupan umat manusia yang mencerminkan toleransi dan perdamaian.

Dalam konteks inilah, pendidikan Islam sebagai media pembebasan umat dihadapkan pada tantangan bagaimana mengembangkan moderatisme sehingga pada gilirannya di dalam masyarakat akan tumbuh pemahaman yang inklusif. Tertanamnya kesadaran keagamaan yang moderat di masyarakat, akan menghasilkan corak paradigma beragama yang *hanief* dan toleran. Ini semua harus dikerjakan pada level bagaimana membawa pendidikan Islam, ke dalam paradigma yang toleran dan humanis. Karena paradigma pendidikan yang eksklusif dan intoleran jelas-jelas akan mengganggu harmonisasi masyarakat. Dengan demikian, filosofi pendidikan Islam yang eksklusif tidak relevan lagi di zaman ini. Sebab, jika cara pandanganya bersifat eksklusif dan intoleran, maka teologi yang diterima adalah teologi eksklusif dan intoleran, yang pada gilirannya akan merusak harmonisasi agama-agama, dan sikap menghargai perbedaan.

Kebesaran Islam Indonesia yang diwariskan para ulama seperti Syamsuddin al-Sumatrani, Nurudin al-Raniri, Abdul Rauf Singkel, dan Abdul Samad al-Palimbani, Syekh Yusuf al-Makasari, Syekh Arsyad al-Banjari, Syekh Nawawi al-Bantani, atau Syekh Ahmad Khatib sesungguhnya menampilkan karakter yang moderat. Dari para ulama inilah peran mesin budaya dan peradaban (transformasi kultural) yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat nusantara terwujud.

Cikal bakal inilah yang kemudian melahirkan generasi selanjutnya, seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Musthofa dalam mengembangkan Islam Indonesia dengan karakter yang moderat melalui pendidikan Islam di pesantren. Karena pesantren hadir sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan, untuk menegakkan nilai-nilai ajaran agama melalui pendidikan keagamaan dan pengayoman serta dukungan kepada kelompok-kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama dan mengatur hubungan antar mereka. Secara pelan-pelan, pesantren berupaya merubah dan memperkembangkan cara hidup masyarakat nusantara yang mampu menampilkan sebuah pola kehidupan Islam yang moderat.

Akhirnya dapat terekam dalam sejarah bahwa tokoh-tokoh seperti KH. Achmad Siddiq, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ali Yafie, KH. Sjechul Hadi Permono, KH. Muhammad Tholchah Hasan, KH. Abdul Muchith Muzadi, KH. M.A. Sahal Mahfudh, KH. Said Agil Siradj, dan KH. Masdar Farid Mas'udi,¹² adalah tokoh-tokoh yang lahir dari pendidikan Islam yang inklusif dan tidak mengalami radikalisasi, tetapi justru menunjukkan sikap akomodasi dalam setiap perubahan zaman sehingga memunculkan karakter yang toleran dan damai.

E. Penutup

Munculnya radikalisme di jantung pendidikan Islam, terutama di madrasah dan pesantren diperkuat lagi dengan perkembangannya di sekolah dan kampus telah menjadi Islam Indonesia mengalami pergeseran, dari yang didominasi oleh moderatisme ke radikalisme. Paling tidak wacana yang diyakini dan didakwahkan membawa pemahaman keagamaan radikal, seperti penolakannya terhadap Negara Indonesia yang tidak berdasarkan Islam melainkan Pancasila.

Jantung pendidikan yang paling banyak dilakukan penetrasi oleh kelompok radikal adalah sekolah, kampus, masjid, madrasah, dan pesantren. Dipilihnya lembaga pendidikan, karena di tempat inilah, pembangunan karakter dimulai dan disebarakan sekaligus sebagai sarana kaderisasi. Sehingga dengan menguasai masjid berarti telah mengontrol corak pemahaman keagamaan masyarakat.

Jika jantung pendidikan Islam telah dikuasai, maka sasaran akhirnya adalah mengubah Negara, mengganti dasarnya, sekaligus hukumnya. Inilah yang dicita-citakan oleh kelompok Islam radikal, tetapi mereka juga sebenarnya melupakan kerapuhan yang mereka miliki dalam membangun konsolidasi gerakan yang berbeda-beda orientasinya.

¹²Lihat Mujamil Qomar. 2002. *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.

SUMBER BACAAN

- Abdillah, Masykuri (1999): *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ahmed, Akbar S and Hastings Donnan (eds) (1994): *Islam, Globalization and Postmodernity*. London: Routledge.
- Anwar, M. Syafi'i (1995): *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Bruinessen, Martin Van (1995): *Kitab Kuning dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Effendy, Bahtiar (1999): *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Effendy, Bahtiar (2001): "Agama dan Politik: Mencari Keterkaitan yang Memungkinkan antara Doktrin dan Kenyataan Empirik", dalam M. Din Syamsuddin. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logis Wacana Ilmu.
- Geertz, Clifford (1960): *The Religion of Java*. Glencoe: Free Press.
- Liddle, R. William (1999): "Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward (ed). *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Nehden, Fred Robert von der (1985): "Islam dan Negara di Indonesia dan Malaysia", dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (ed.). *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Noer, Deliar (1994): *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Sumitro, Warkum (2005): *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Wahid, Abdurrahman (1999): "Pondok Pesantren Masa Depan", dalam Marzuki Wahid, dkk (peny.). 1999. *Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Qomar, Mujamil (2002): *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlulsunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Zada, Khamami (2002): *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: Teraju.